

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan mutu Sumber Daya manusia (SDM), merupakan satu di antara dua isu besar yang mewarnai arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia pada pelita VI dan PJPT II. Isu besar lainnya adalah pengetasan kemiskinan, yang pada dasarnya merupakan suatu hal yang keberadaannya dipersyaratkan sumber daya manusia yang bermutu. Pada bangsa yang sumber dayanya tidak bermutu, sukar diharapkan kemiskinan dapat dientaskan. Sebaliknya negara yang miskin sumber daya alam dan sempit daerahnya, akan menjadi kaya dan terhindar dari kemiskinan para penduduknya, bila sumber daya manusianya (SDM) bermutu. Banyak faktor dan bentuk kegiatan bagi peningkatan mutu sumber daya manusia. Namun apakah faktor dan bentuk kegiatannya, dapat dipastikan di dalam terdapat upaya pendidikan. Pendidikan merupakan upaya strategis bagi peningkatan mutu sumber daya manusia, baik dalam liputan masyarakat kecil maupun masyarakat besar suatu negara. Bahkan dikatakan pula bahwa maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu. Dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan bagi masa yang akan datang.

Pendidikan merupakan sarana pembinaan sumber daya manusia untuk pengembangan bangsa, sehingga berwujud dikeluarkannya ketentuan mengenai wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1994 dan dikeluarkannya pedoman wajib belajar pendidikan dasar. Butir 8b dan 9a pedoman tersebut menjelaskan bahwa : Pengelolaan pelaksanaan teknis wajib belajar pada setiap

satuan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan(8b). Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat (9a).

Penjelasan ini berimplikasi terhadap tuntutan manajemen proses belajar mengajar di sekolah untuk mampu berupaya mengikut sertakan masyarakat secara efektif, terlaksananya wajib belajar di sekolah dan pendidikan umumnya.

Masyarakat sebagai mitra penyelenggara pendidikan, dalam era globalisasi ini semakin menyadari pula peran pendidikan, dan mereka kelihatannya sudah lebih siap menerima penyesuaian dan upaya keselarasan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuannya secara efektif.

Peran sekolah SLTP juga semakin diperhitungkan, dalam rangka menyiapkan peserta didik yang beriman, berakhlak, berkepribadian bangsa, dan memiliki sikap positif terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah tahun 1990 pasal yang intinya bahwa SLTP merupakan kelanjutan sekolah dasar dituntut untuk memberikan bekal kemampuan dasar peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota ummat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Secara rinci dijelaskan tujuan tersebut pada kutipan di bawah ini.

- a. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk:
1. Memperkuat dasar keimanan dan ketaqwaan
 2. Membiasakan untuk berperilaku yang baik;
 3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar;
 4. Memelihara kesehatan jasmani;
 5. Memberikan kemampuan untuk belajar;

6. Memberikan kepribadian yang mantap dan mandiri.
- b. Mengembangkan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat sekurang-kurangnya menyangkut upaya untuk :
 1. Kesadaran untuk hidup beragam dalam masyarakat;
 2. Menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam lingkungan hidup;
 3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai warganegara sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk:
 1. Mengembangkan perhatian dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia;
 2. Menanamkan rasa ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan bangsa dan negara;
 3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota ummat manusia mencakup upaya untuk:
 1. Meningkatkan harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat;
 2. Meningkatkan kesadaran tentang hak azasi manusia;
 3. Memberikan pengertian tentang ketertiban dunia;
 4. Meningkatkan kesadaran pentingnya persahabatan antar bangsa.

Produktivitas proses belajar mengajar di sekolah diukur dari adanya ciri-ciri pengembangan diatas. Proses belajar mengajar di sekolah yang mampu mengakses tuntutan tersebut cenderung mendapat perhatian masyarakat, untuk membantu perkembangannya. Peran satuan pendidikan di sekolah diharapkan mampu mengantisipasi kecenderungan tersebut, sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama yang harmonis, serta dapat membina peluang kerjasama dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki.

Dalam kaitan ini kepala sekolah dan guru sangat berperan untuk terciptanya harapan diatas, melalui wewenang kepemimpinannya yang dapat menciptakan kinerja manajemen kearah pengembangan tersebut. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 pasal 12 ayat 1 menegaskan peran kepala tersebut dibawah ini.

“Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah pembinaan tenaga pendidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana’.

Tugas kepala sekolah sebagai administrator memiliki dimensi tanggungjawab mutlak pengembangan sekolah melalui pelaksanaan fungsi-fungsi administratif sekolah.

Menurut Hadari Nawawi (1985:16) fungsi administratif tersebut secara praktek sulit untuk dipisahkan, tetapi secara teoritis dapat digolongkan dalam bagian-bagian di bawah ini.

1. Administrasi kesiswaan;
2. Administrasi Proses Belajar Mengajar
3. Administrasi perbekalan sekolah
4. Administrasi keuangan sekolah
5. Administrasi personil seklah
6. Administrasi ekstra dan ko-kurikuler;
7. Kepenimpinan kepala sekolah;
8. Supervisi kepala sekolah

Selanjutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Dasar (1995/1996 : 18 –40) memberikan petunjuk mengenia pengelolaan sekolah dasar dan SLTP tersebut dalam ruang lingkup administrasi sekolah terdiri dari komponen administrasi kesiswaan, kepegawaian (personil sekolah), kesejahteraan guru, program pengajaran/kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, tata usaha, hubungan sekolah dan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan sekolah.

Selanjutnya Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0487/U/1992 pasal 28 menggambarkan ruang lingkup administrasi sekolah, dilihat dari penegasan tanggung jawab kepala sekolah di bawah ini.

Kepala sekolah dan guru bertanggungjawab atas.

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan meliputi;
 - a. Penyusunan program pengajaran sekolah;
 - b. Pengaturan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan penyuluhan;
 - c. Penyusunan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja sekolah;
 - d. Pendayagunaan buku perpustakaan sekolah
2. Pembinaan siswa;
3. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bagi guru;
4. Pembinaan tenaga pendidikan lainnya;
5. Penyelenggaraan administrasi sekolah;
6. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
7. Pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua atau masyarakat;
8. Pelaporan pelaksanaan pendidikan.

Ketentuan diatas menggambarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah dan guru yang kompleks, dan seyogyanya mampu melaksanakan tugas di atas dalam upaya mengembangkan manajemen proses belajar di sekolah. Tugas tersebut dapat digolongkan dalam komponen-komponen administrasi sekolah antara lain : (a) kesiswaan; (b) pengajaran atau kurikuler; (c) keuangan; (d) sarana dan Prasarana; (e) kepegawaian sekolah; dan (f) hubungan sekolah dan masyarakat.

Kepala sekolah diharapkan mampu mengembangkan manajemen sekolah dalam ruang lingkup administrasi tersebut untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar secara produktif, efektif dan efisien.

Keberhasilan manajemen pengembangan proses belajar mengajar di sekolah sebagai tujuan jangka panjang seyogyanya selalu dibina bagi menjamin produktivitas manajemen sekolah. Dalam kaitan ini, J. Allan Thomas (1972) menganalisis bahwa produktivitas sekolah terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu (a) fungsi administratif atau membina fungsi pelayanan yang memberikan kepuasan kepada konsumen (peserta didik, masyarakat, atau stakeholder); (b) fungsi psikologis yaitu terbinanya perilaku positif peserta didik yang merupakan hasil pembelajaran di sekolah secara efektif; (c)

fungsi ekonomis, yaitu peserta didik memiliki akses untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari hasil pendidikan yang diterimanya. Ketiga fungsi tersebut terintegrasi pada aspirasi masyarakat terhadap sekolah.

Keberhasilan manajemen pengembangan proses belajar mengajar yang berwujud pada produktivitas sekolah diatas diwujudkan melalui pengelolaan fungsi administrasi, untuk menjamin langkah-langkah kerja yang selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan di atas.

Beberapa ahli merumuskan fungsi administrasi sebagai titik tolak pelaksanaan manajemen, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1-1
FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI

No.	George R Terry	Henry Fayol	H. Koontz & C. O'donel	Willian H Newman
1.	Planning	Planning	Planning	Planning
2.	Organizing	Organizing	Organizing	Organizing
3.	Actuating	Commanding	Staffing	Assembling resources
4.	Controlling	Coordinating	Directing	Communicating
5.	-	Controlling	Controlling	Controlling
No.	L. Gullick	John F. Mee	Edward A. Lit Chiefield	Harold Koonts & H. Weichrich
1.	Planning	Planning	Decission making	Planning
2.	Organizing	Organizing	Programming	Organizing
3.	Staffing	Motivating	Directing	Staffing
4.	Directing	Controlling	Controlling	Leading
5.	Coordinating	-	-	Controlling
6.	Reporting	-	-	-
7.	Controlling	-	-	-

Berdasarkan gambaran diatas dapat dicermati bahwa fungsi administrasi harus terlaksana secara efektif, bagi terwujudnya pencapaian tujuan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.

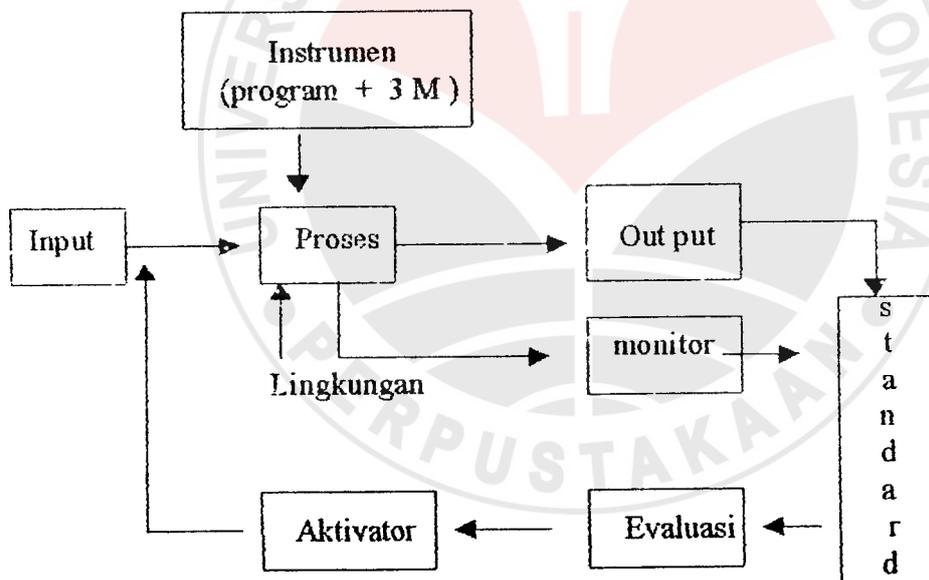
Sejalan dengan uraian diatas, maka administrasi pendidikan mempunyai fungsi yang integral dalam proses belajar mengajar di sekolah terutama dalam pengelolaan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karenanya fungsi administrasi di sekolah meliputi : (1) fungsi perencanaan, (2) fungsi organisasi, (3) fungsi koordinasi, (4) fungsi komunikasi, (5) fungsi supervisi, (6) fungsi kepengawasan, (7) fungsi pembiayaan, dan (8) Fungsi evaluasi.

Urgensi fungsi administrasi pendidikan berimplikasi kepada pemberdayaan manajemen proses belajar mengajar di sekaolah, Fungsi administrasi pendidikan sesungguhnya merupakan media untuk menciptakan situasi yang menguntungkan bagi suatu lembaga atau sekolah. Sebab tanpa fungsi tersebut lembaga atau sekolah sesusungguhnya hanya melaksanakan ritinitas-rutinitas kegiatan proses belajar mengajar, tanpa dapat mengendalikan situasi. Fungsi administrasi berperan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi kepada tujuan dan maksud yang dibatasi serta mengurangi perbuatan yang disfungsi atau untung-untungan. Dengan demikian keberhasilan manajemen pengembangan proses belajar mengajar di lembaga/sekolah adalah adanya wujud persiapan-persiapan untuk melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa datang melalui fungsi administarasi. Semua kegiatan proses belajar mengajar di lembaga/sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang menuruti garis fungsi-fungsi administrasi pendidikan tersebut.



Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa fungsi administrasi sebagai kerangka operasional yang matang untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan potensi sumber-sumber yang tersedia baik manusia maupun fasilitas, peluang-peluang lingkungan mencapai tujuan pendidikan yang produktif.

Fungsi administrasi pendidikan juga berfungsi sebagai sarana penyatuan berbagai potensi yang ada termasuk upaya melibatkan masyarakat dalam manajemen proses pendidikan di lembaga/sekolah. Agar proses pendidikan di lembaga/sekolah dapat lebih aspiratif terhadap nilai-nilai masyarakat. Dalam kaitian ini fungsi administrasi pendidikan juga menggunakan pola input – process – output sebagaimana gambar di bawah ini



Sumber : Sistem dan mekanisme fungsi administrasi tahunan terpadu dan perencanaan makro serta mikro pembangunan pendidikan (Depdikbud 1989:8)

Gambar 1-1
SIKLUS FUNGSI ADMINISTRASI BERPOLA INPUT-PROCESS-OUTPUT

Upaya pengembangan proses pendidikan terutama dalam era globalisasi ini ditandai dengan kemampuan mengadakan komunikasi secara efektif pihak terkait melalui kerativitas sehingga mampu menciptakan komitmen kerja, pengawasan, pengendalian dan pembinaan proses pendidikan.

Sehubungan dengan itu fungsi administrasi pendidikan berkaitan erat dengan strategi manajemen proses belajar mengajar perlu diupayakan melalui kemampuan identifikasi posisi manajemen proses belajar mengajar di lembaga/sekolah berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, mengetahui tantangan perkembangan manajemen proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Secara keseluruhan kondisi tersebut dilaksanakan melalui fungsi administrasi pendidikan yang memungkinkan penerapan langkah-langkah kerja yang efektif kepada pencapaian tujuan pendidikan. Upaya tersebut di lembaga pendidikan dilaksanakan melalui langkah-langkah pencapaian sasaran-sasaran dalam BHP (Bidang Hasil Pokok) dalam komponen administrasi pendidikan.

Keberhasilan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar berkaitan erat dengan manajemen pendidikan yang dapat dilihat dari aspek-aspek perkembangan perangkat komponen sistem proses belajar mengajar dan perangkat-perangkatnya dalam ruang lingkup administrasi proses belajar mengajar. Setiap komponen proses belajar mengajar mempunyai Bidang Hasil Pokok (BHP) yang merupakan sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai.

Dalam kaitan ini Abin Syamsuddin Makmun (1996 :8) menjelaskan perlunya penetapan secara objektif BHP sebagai upaya mengambil langkah-langkah strategis manajemen, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.



“Pada tingkat unit kerja/sistem pendidikan yang paling sederhana sekalipun, tingkat variabelnya itu cukup rumit (Complex). Oleh karena itu perlu dilakukan pilihan yang tepat, mana diantaranya yang dipandang paling bernilai strategis untuk diikuti-sertakan kedalam BHP atau KRA”.

BHP komponen administrasi sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Administrasi kesiswaan yaitu mengoptimalkan kelengkapan data siswa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran, bimbingan siswa, dan keaktifan pembinaan siswa dan keterlaksanaan kegiatan ekstra kurikuler sekolah.
- b. Administrasi pengajaran, adalah terbinanya kegiatan proses belajar mengajar secara efektif, disiplin administratif dan operasional sekolah.
- c. Administrasi kepegawaian (personil sekolah) yakni terlaksananya pelayanan hak-hak kepegawaian di sekolah seperti kelancaran dalam urusan promosi kepangkatan, pengajian, kesejahteraan, dan dukungan bagi pengembangan profesi.
- d. Administrasi keuangan sekolah, yakni terlaksananya tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah secara efektif dan efisien menunjang keberhasilan manajemen sekolah
- e. Administrasi sarana dan prasarana sekolah, yakni terlaksananya pemanfaatan, pemeliharaan, dan upaya melengkapinya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
- f. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, adalah mengupayakan terbinanya kerjasama yang harmonis, lancar dengan pihak terkait (stakeholder) seperti orang

tua siswa, instansi pemerintah, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan lainnya.

Bidang Hasil Pokok tersebut merupakan arah manajemen sekolah yang harus dijabarkan dalam langkah-langkah kerja sekolah, untuk mencapai keberhasilannya.

Para pelaksana (praktisi) satuan pendidikan di sekolah SLTP diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah di atas, dalam rangka pengembangan sekolah, aspiratif terhadap kemajuan lingkungan dan tuntutan masyarakat, dan perkembangan teknologi yang telah membawa dampak terhadap kecenderungan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik, sehingga tuntutan terhadap pendidikan dan mutu sekolah semakin besar. Hal ini merupakan isu penting, bahwa sekolah dapat menyerap aspirasi masyarakat, cenderung memperoleh perhatian yang lebih baik, dan merupakan akses untuk bekerjasama dalam mengembangkan fungsi administrasi akademik manajemen sekolah mengantisipasi tuntutan yang berkembang tersebut.

B. Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, maka permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah bagaimana potret peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam di SLTP PGRI Ujungberung. Proses belajar mengajar sebagai suatu sistem sudah lebih terbuka dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Manajemen proses belajar mengajar seyogyanya menyeleraskan langkah pengembangannya dalam kondisi yang semakin kompetitif terhadap tuntutan pengembangan sumber daya manusia yang semakin disadari memerlukan pendidikan

yang berkualitas. Bagaimana kemampuan manajerial para pelaksana satuan pendidikan di sekolah SLTP PGRI Ujungberung terhadap tantangan situasi demikian khususnya proses belajar mengajar pendidikan agama Islam?, dan bagaimana ketaivitas mereka mengupayakan penyesuaian langkah pengelolaan, menjawab tantangan tugas tersebut/. Pembahasan ini pada pokoknya menjawab sekitar pertanyaan diatas, dan yang menjadikan masalah penelitian, yang perlu ditemukan jawabannya, dalam upaya menambah wawasan pengembangan peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar di sekolah bagi peneliti sendiri dan kiranya dapat memberi masukan pula pada pihak yang terkait untuk membina sistem proses belajar mengajar yang lebih efektif.

2. Rumusan dan Masalah Penelitian

Sebagaimana pokok masalah diatas, maka masalah penelitian secara umum dirumuskan manyangkut : (a) bagaimana peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam ?; (b) Apakah peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama islam sudah efektif?: (c) Sejauhmana tingkat keberhasilan peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam yang di capai saat ini (kelayakan sistem dan kinerja sistem proses belajar mengajar)?: (d) Upaya-upaya apa yang dilaksanakan administrator pendidikan selama ini dalam upaya meningkatkan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam?:(e) Bagaimana tindak lanjut mengupayakan peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam tersebut? dan (f) Apa yang menjadi faktor kekuatan dan kelemahan proses belajar mengajar pendidikan

agama Islam? Pertanyaan ini akan dikembangkan pada kajian pembahasan penelitian dalam tesis ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang proses fungsi administrasi akademik SLTP PGRI Ujungberung dalam mencapai misi/tujuan institusionalnya sebagaimana tercantum dalam dalam buku program kerja sekolah.

2. Tujuan Khusus

Dalam hal ini penelitian lebih ditujukan pada evaluasi proses fungsi administrasi akademik pada hal yang menyangkut:

(a) Gambaran mengenai kondisi peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam; (b) efektifitas peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam selama ini; (c) keberhasilan peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam yang dicapai saat ini; (d) Upaya-upaya yang dilaksanakan administrator dalam peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama, (e) Tindak lanjut upaya-upaya peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam dan (f) Faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam di SLTP PGRI Ujungberung.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada kepala sekolah, guru/pendidik dan pihak yang terkait terhadap aspek-aspek: (a) Peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam; (b) kinerja peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses proses belajar mengajar pendidikan agama Islam; (c) Upaya-upaya peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses pendidikan agama Islam, (d) Fotret alternatif peningkatan fungsi administrasi akademik yang berpotensi untuk dikembangkan dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam; (konerja peningkatan fungsi administrasi akademik yang efektif dan efeisien ke arak pengembangan proses pendidikan yang diharapkan.

D.Kerangka Penelitian

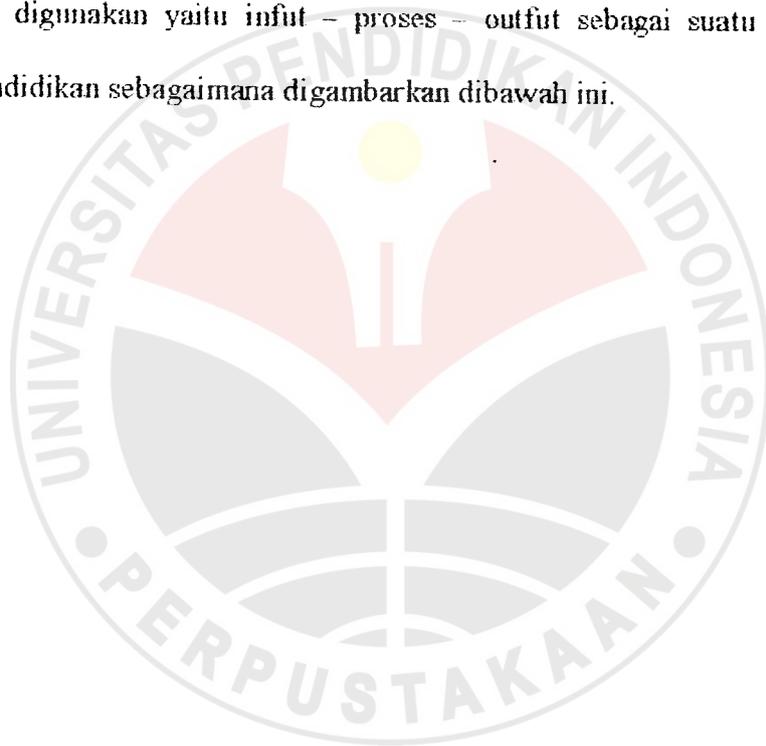
Kerangka acuan penelitian merupakan suatu landasan pemikiran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan penelitian. Landasan pemikiran meliputi beberapa konsep bahasan teoritis mengenai masalah penelitian ini.

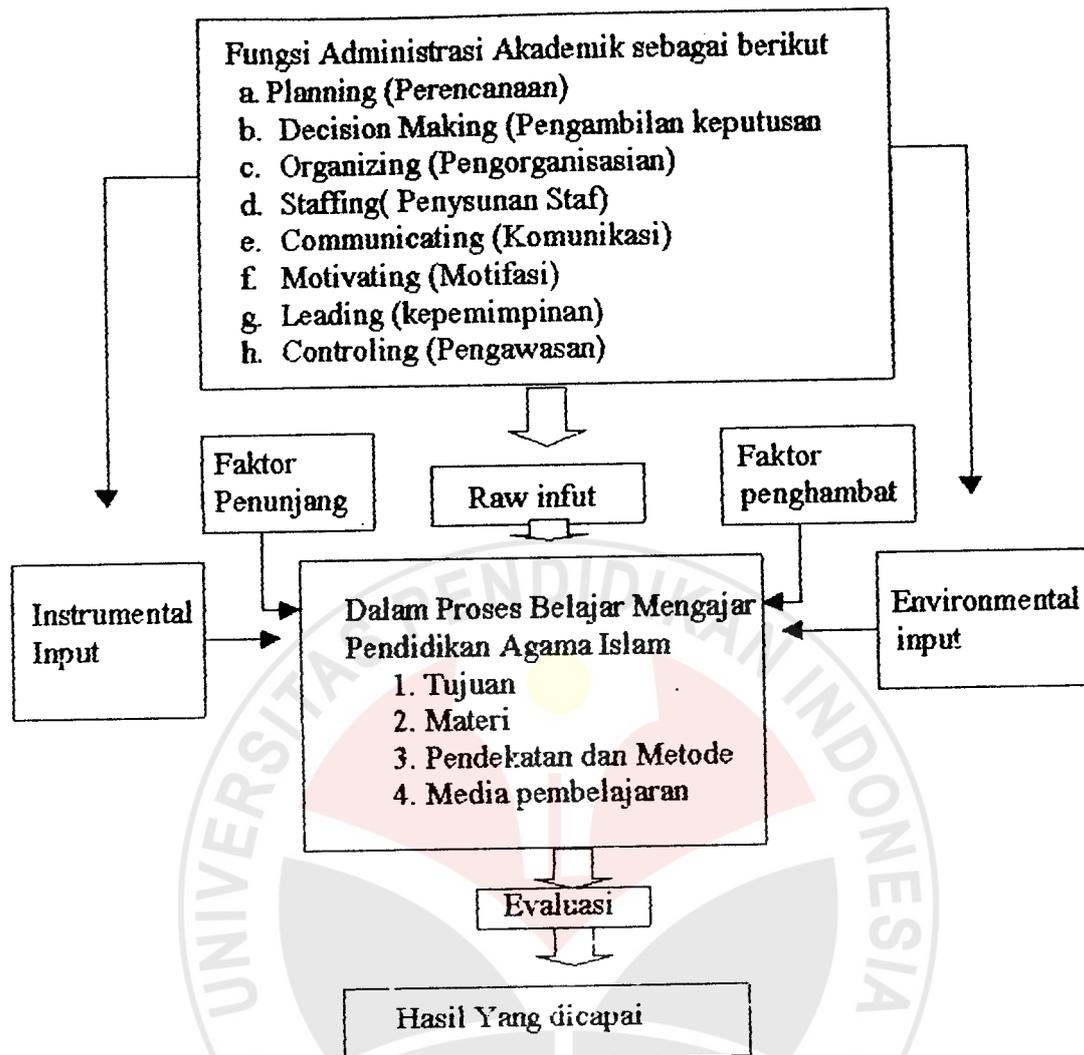
Kajian ini berbentuk studi kasus kualitatif deskriptif analitik. Lincoln dan Guba (1985), Bogdan dan Biklen (1989) dan Maleong dalam Manap Sumantri (1993 :93) mengemukakan bahwa studi tersebut bercirikan:

- a. mempunyai latar ilmiah (natural setting)
- b. Manusia sebagai alat atau instrumen penelitian, sehingga memungkinkan adabtabilitas;
- c. Menggunakan metode kualitatif;
- d. Analisis data secara induktif;
- e. Teori dari dasar (grounded theory) melalui analisis secara induktif;
- f. Lapaorannya bersifat deskriptif
- g. Lebih mementingkan proses dari pada hasil
- h. Adanya "batas" yang ditentukan oleh fokus penelitian;
- i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahab data;

- j. Desain bersifat sementara;
- k. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Sesuai dengan pembahasan diatas bahwa peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam dilaksanakan dalam setiap komponen administarasi akademik mempunyai sasaran-sasaran secara logis yang harus dicapai sebagai BHP (Bidang Hasil Pokok) sebagaimana yang diuraikan diatas, secara integral menunjukkan gambaran produktivitas peningkatan fungsi adaministrasi akademik yang dapat dinilai secara kualitatif. Maka pola penelitian dan kerangka bertikir yang digunakan yaitu infut – proses – outfut sebagai suatu sistem dalam mengelola pendidikan sebagaimana digambarkan dibawah ini.



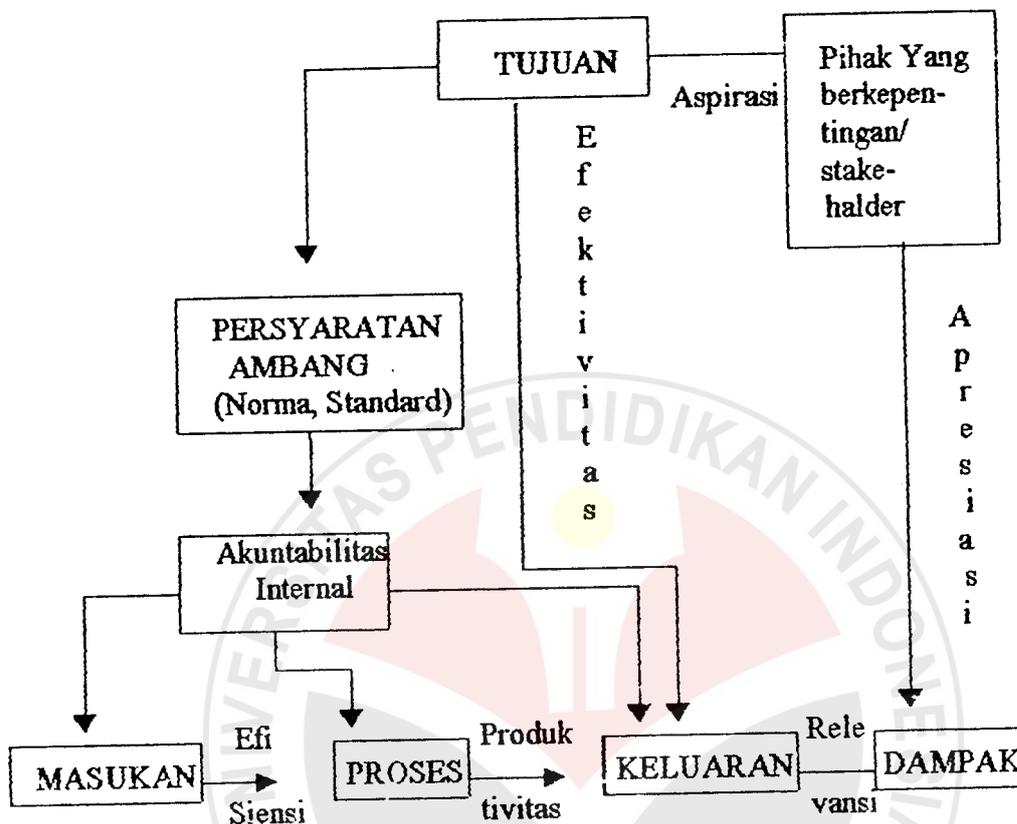


Gambar 1-2

Peningkatan Fungsi Administrasi Akademik
Dalam Proses Belajar Mengajar PAI

Tingkat keberhasilan peningkatan fungsi administrasi akademik dalam proses belajar pendidikan agama Islam merupakan hasil atau produktivitas manajemen pengembangan proses belajar mengajar yang dilihat dari kriteria-kriteria pengembangan (1) perangkat sistem proses belajar mengajar (tujuan, materi, metode, media, perangkat masuk, proses, keluaran, dan peran stakeholder); dan (2) indikator

kinerja sistem proses belajar mengajar (produktivitas, efisiensi, efektivitas, relevansi, akuntabilitas sekolah) yang digambarkan di bawah ini.



Sumber : Abin Syamsuddin Makmun (Analisis posisi pendidikan 1996 : x)

Gambar 1-3
KRITERIA PERANGKAT SISTEM PENGEMBANGAN FUNGSI ADMINISTRASI
AKADEMIK SEKOLAH

Produktivitas peningkatan fungsi administrasi akademik dalam pembahasan ini pada prinsipnya menunjukkan suatu ukuran tingkat daya hasil setiap program dan/atau keseluruhan perangkat program yang menjadi tugas/ fungsi BHP (Bidang Hasil Pokok) yang menjadi tanggung jawab sekolah sebagaimana dipaparkan pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) diatas. Indikator produktivitas pengembangan fungsi administrasi

akademik sekolah diungkapkan pula dengan mencari parameternya, ialah angka rasio jumlah lulusan dengan jumlah satuan waktu studi (student year) yang digunakan seluruh peserta didik yang terdaftar pada suatu kurun waktu yang sama (1991).

E. Hipotesis

Sebagaimana latar belakang dan masalah yang dikemukakan diatas, menyangkut pengkajian peningkatan fungsi administrasi akademik sebagai faktor penunjang keberhasilan manajemen peningkatan proses belajar mengajar pendidikan agama Islam di sekolah. Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan bahwa “ Peningkatan Fungsi Administrasi Akademik dalam proses belajar mengajar merupakan faktor penunjang keberhasilan manajemen pengembangan proses pendidikan dalam wilayah penelitian ini”

